

MALADMINISTRASI OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ATAS PEMBLOKIRAN DAN PELAMBATAN INTERNET DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Nama: Emmanuela Kevin Panggabean
Jurusan/Program: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing: Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum
Bapak H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRAK

Pasca terjadi unjuk rasa yang sebagian disertai dengan kerusuhan 19 Agustus 2019 di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat yang diakibatkan oleh isu rasisme terhadap beberapa mahasiswa Papua di Surabaya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk membatasi akses internet melalui siaran pers untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama peredaran info hoax dan provokatif. Namun hal ini dianggap telah mencederai kebebasan masyarakat yang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari mana pun. Media yang tersedia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi hanya SMS dan telepon. Alhasil masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya khususnya kegiatan ekonomi, terkendala dalam mengakses dan mengekspresikan informasi di media sosial. Padahal peraturan perundang-undangan di Indonesia pun belum mengatur secara spesifik wewenang untuk memutus akses internet. Konstitusi juga menyebutkan bahwa dalam membatasi hak yang bersifat konstitusional harus dilakukan dengan Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbuatan maladministrasi oleh Kemenkominfo dalam melambatkan dan memblokir akses internet di beberapa wilayah provinsi Papua dan Papua Barat.

Kata Kunci: Maladministrasi, *onrechtmatige overheidsdaad*, pelayanan public

**MALADMINISTRATION BY THE MINISTRY OF COMMUNICATION AND
INFORMATICS OVER INTERNET BLOCKING AND THROTTLING IN
PAPUA AND WEST PAPUA PROVINCES**

Name: Emmanuela Kevin Panggabean
Dicipline/Study Programme: Law/Legal Studies
Contributor: Prof. Dr. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum
Bapak H. Sudarsono, S.H., M.S.

ABSTRACT

After protests that were partly accompanied by riots on August 19, 2019 in a number of areas of Papua and West Papua caused by the issue of racism against some Papuan students in Surabaya, the Government of Indonesia through the Ministry of Communication and Information (Kemenkominfo) decided to restrict internet access through press releases to avoid unwanted things, especially the circulation of hoax and provocative info. However, this is considered to have harmed the freedom of the public who have the right to communicate and get information from anywhere. The available media to communicate and obtain information is only SMS and telephone. As a result, people are unable to carry out their daily activities, especially economic activities, constrained in accessing and expressing information on social media. In fact, the laws and regulations in Indonesia have not specifically regulated the authority to cut off internet access. The Constitution also states that in limiting constitutional rights must be exercised by Law. This study aims to analyze the maladministration by the Ministry of Communication and Information in slowing down and blocking internet access in several provinces of Papua and West Papua.

Keywords: *Maladministration, onrechtmatige overheidsdaad, public service*